

Raperda Pembinaan Lansia Jawa Timur:

Fokuskan ke Lansia Perdesaan

Oleh: H. Mohammad Adib, MA.

Ketua Litbang dan Organisasi LLI (Lembaga Lansia Indonesia) Jawa Timur dan Pimred Berkala Ilmiah Kependudukan (Terakreditasi) Universitas Airlangga hmadib@unair.ac.id

Sejumlah 3.6 juta penduduk Lansia (Lanjut Usia) di propinsi Jawa Timur akan merasa lebih bergembira sehubungan dengan kepedulian yang diberikan oleh Pemerintah di propinsi ini. Terhitung sejak bulan Agustus ini secara formal sedang digarap penyusunan Perda (Peraturan Daerah) baru yang mengatur tentang pembinaan terhadap Lansia. Perda ini merupakan konkritisasi dari sejumlah kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya, yakni Instruksi Gubernur KDH Tk I Jawa Timur tentang Pembinaan terhadap Lanjut Usia; Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur No. 65/1996 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda di Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur; dan Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur No. 188/309/SK/014/1999, tentang Tim Pembina Pemberdayaan Lanjut Usia Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur;

Pada kurun 15-an tahun terakhir, Pemerintahan RI telah secara berkelanjutan menaruh kepedulian yang khusus kepada penduduk Lansia ini. Di tingkat nasional, berturut-turut telah ditetapkan sejumlah kebijakan. Antara lain, Undang Undang (UU) No. 23 Tahun 1992 Kesehatan; UU No. 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional; UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah RI No. 43/2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; dan Keputusan Presiden No. 52/2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.

Arah dari kebijakan-kebijakan tersebut antara lain bermaksud untuk membangun apresiasi terhadap Lansia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya; Penjagaan diprioritaskan pada aspek kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi Lansia; Pemberian hak-hak Lansia berupa perolehan perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Sementara hak-hak yang diberikan dan telah dirasakan perolehannya kepada Lansia sejauh ini berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) seumur hidup yang dapat dipergunakan untuk memperoleh potongan harga biaya transportasi darat, udara, dan laut, keringanan biaya pemeriksaan dan atau perawatan kesehatan, serta pelayanan pada loket khusus saat pengurusan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan BPKB (beban pajak kendaraan bermotor).

Belajar di Perdesaan Yogyakarta

Jumlah Lansia di Jawa Timur saat ini berdasar pada data dari Dinas Sosial telah mencapai angka 10% dari total 36 juta penduduk yakni, 3,6 juta jiwa. Sedangkan menurut data pada Sensus Penduduk (SP) tiga dekade terakhir, jumlah Lansia (Penduduk berumur 60 tahun ke atas) di Jawa Timur mencapai persentase 6,54% (1980), meningkat menjadi 10,71% (1990). Persentase tersebut sedikit menurun lagi menjadi 9,36% (2000). Angka 10% yang dipergunakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur merupakan persentase rata-rata pada dua dekade terakhir yakni 1990 dan 2000 sebagaimana hasil SP. Pada SP tahun 2000 penduduk Jawa Timur mencapai angka 34,7 juta. Jumlah angkat tersebut tentu akan bertambah jika juga memasukkan penduduk yang telah memasuki masa pensiun bagi PNS misalnya umur 55 tahun digolongkan dalam Lansia. Sehingga tidak terlalu meleset bila pada perkembangan enam tahun terakhir ini jumlahnya diperkirakan mencapai 36 juta penduduk.

Tabel: Perbandingan Persentase Lansia di Jawa Timur berdasarkan Tempat Tinggal di Perkotaan dan Perdesaan Tahun 1980, 1990, dan 2000

Tahun	Wilayah		Jumlah	Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan		%
1980	322,296	1,586,371	1,908,667	83%
1990	609,438	2,871,259	3,480,697	82%
2000	1,112,321	2,143,006	3,255,327	66%

Sumber: SP 1980, 1990, 2000, diolah. Adib (2003)

Dari data tersebut, sejumlah 66-83% para Lansia di Jawa Timur itu tinggal di daerah perdesaan, meskipun terdapat kecenderungan bahwa para Lansia itu berpindah tempat tinggal ke perkotaan mencapai angka 17% baik perpindahan (migrasi) itu dilakukan secara administratif yakni sejumlah desa statusnya telah diubah menjadi kota maupun kenyataan konkrit mereka bermigrasi karena mengikuti keluarga atau sebab lainnya (lihat tabel).

Kenyataan bahwa mayoritas Lansia Jawa Timur tinggal di perdesaan. Karenanya fokus pembinaan dan pemberdayaan hendaknya juga difokuskan di wilayah perdesaan, meskipun juga tidak boleh melupakan Lansia yang bertempat tinggal di perkotaan. Tentang hal ini ada baiknya Jawa Timur belajar di propinsi lain di tanah air ini misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk wilayah perdesaan.

Pemberdayaan Lansia di perdesaan DIY dilakukan dengan menyelenggarakan Taman Pembinaan Lansia (TPL) yang inisiatornya adalah dari kalangan Lansia lokal sendiri. Di Kampung Wirosaban RW 14, Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo. TPL yang dipimpin oleh Menik Ardjani (62), sejak Juni 2003 telah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara gratis. TPL juga melayani pemberian vitamin, minuman

jamu, hingga penyuluhan penyakit para lanjut usia (lansia). Bentuk pelayanannya, berupa pengelolaan dan penanganan penyakit jantung, paru-paru, atau darah tinggi dan penyakit lainnya yang umumnya menghinggapi para Lansia. Kegiatan yang dilaksanakan sekali dalam waktu sebulan ini didukung oleh para donatur dan gotong royong warga setempat (terutama dari kalangan berduit). Mereka juga mendirikan Pos Obat Desa (POD), sebagai sarana pelayanan kesehatan tambahan yang menyatu dengan TPL untuk melayani lansia (termasuk anak-anak) yang kurang mampu.

TPL dan POD dikembangkan oleh inisiatif Lansia lokal yang manfaatnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat di sekitar. Karenanya sejumlah dokter sukarela dan ahli kesehatan pun secara bergiliran ikut menjaga TPL dan POD. Mereka adalah dokter sukarela dari warga sekitar kampung Wirosaban itu, antara lain dr Hadianto Ismangun SpA (spesialis anak), dr Kartika (umum), drg Arfanovita Kusumawardani, Drs R Sudarso Apt (apoteker), dan Siti Chotimah (ahli fisioterapi).

Untuk pengadaan dan pembelian obat-obatan, dua lembaga itu bekerja sama dengan agen-agen penjual obat dan grosir obat milik warga setempat supaya memperoleh harga yang murah.

Khusus bagi warga yang kurang mampu, termasuk para lansia dan bocah-bocah kurang sehat di Wirosaban, yang berobat ke POD mendapat kartu untuk penderita (KUP), persis seperti pelayanan rumah sakit resmi. KUP dapat digunakan untuk berobat dan dapat digunakan sebagai kartu rujukan ke puskesmas maupun mondok di rumah sakit. Pengobatan secara gratis, diberikan kepada Warga Wirosaban dan sekitarnya. Bahkan biayanya ditanggung Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Suatu contoh yang sangat cantik dalam pengelolaan dan pemberdayaan Lansia. Bermula dari masyarakat yang gigih untuk berinisiatif kemudian memperoleh dukungan dari pemerintah yang tanggap situasi (Jawa: *tanggap ing sasmito*). Ada baiknya Jawa Timur dapat mengembangkan model pemberdayaan Lansia seperti yang telah berkembang dari bawah di daerah perdesaan Yogyakarta ini. Sedangkan Perda yang sedang disusun oleh Pemprop dan masyarakat Jawa Timur hendaknya dapat memfasilitasi segala hal yang mengarah dan mengindikasikan kepada pemberdayaan pengelolaan Lansia yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat.***